INI HASIL PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK 19 PEMDA DI SUMBAR TAHUN 2024, PEMKAB SOLOK NOMOR 1

Selasa, 19 November 2024 - sumbar

Langgam.id - Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah Kabupaten/Kota, 19 Kantor Pertanahan dan 19 Polres/Polresta di Sumbar.

Hasilnya, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan nilai A, kualitas tertinggi, dengan perolehan nilai 91.65. Tapi, pada lokus pemerintah provinsi, kali ini Sumatra Barat berada pada peringkat 17 dari 34 provinsi. Sementara pada tahun 2023, pemerintah provinsi berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi.

Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan bahwa untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumbar, semua Pemda berhasil memperoleh prediket zona hijau.

"Alhamdulillah, ini capaian yang luar biasa. Semua Pemda berhasil memperoleh predikat zona hijau. 18 Pemda diantaranya dengan kualitas tertinggi dengan kategori nilai A. Hanya Kabupaten Solok Selatan saja yang memperoleh nilai kualitas tinggi, dengan kategori nilai B. Tidak ada Pemda dengan rapor kuning, apalagi merah," ujar Adel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Adel menjelaskan, bahwa pada lokus pemerintah kabupaten, Kabupaten Solok kembali berada pada peringkat nomor 1 di Sumbar. Sedangkan secara nasional berada peringkat 21 dari 416 kabupaten yang dinilai dengan nilai 97,73.

"Naik peringkat dari tahun 2023, yang hanya berada pada peringkat 28 dari 415 kabupaten yang dinilai, dengan nilai 95,08," ucap Adel.

Pada lokus pemerintah kota, sebut Adel, Kota Payakumbuh kembali berada pada peringkat nomor 1 di Sumbar. Secara nasional berada peringkat 12 dari 98 kota yang dinilai dengan nilai 97,6. Naik peringkat dari tahun 2023, yang berada peringkat 32 dari 98 kota yang dinilai, dengan nilai 91,41 .

Adel mengatakan, bahwa ruang lingkup pelayanan publik terbagi menjadi tiga berdasarkan UU 25 Tahun 2009, yaitu layanan administrasi, barang, dan jasa.

"Dalam penilaian kepatuhan, layanan yang dinilai adalah layanan administrasi yaitu Dinas PTSP, Dinas Capil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dan layanan jasa yaitu Puskesmas dan RSUD Provinsi," beber Adel.

Hasil penilaian dikategorikan menjadi, pertama kualitas tertinggi, kategori A, zona hijau, dengan

interval nilai 88 - 100. Kedua kulitas tinggi kategori B, zona hijau dengan interval niai 78 - 87,99. Ketiga kualitas sedang, kategori C, zona kuning dengan interval nilai 54.00 - 77, 79. Dan terakhir, kualitas

rendah, zona merah dengan interval nilai 32.00 - 53.99.

Adel berharap, hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik

serta pencegahan maladministrasi oleh kepala daerah.

Secara lebih lengkap hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 tingkat Pemerintah Daerah di Sumatra Barat sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Solok dengan nilai 97.73 (kualitas tertinggi)

2. Pemerintah Kota Payakumbuh dengan nilai 97.60 (kualitas tertinggi)

3. Pemerintah Kabupaten Agam dengan nilai 95.48 (kualitas tertinggi)

4. Pemerintah Kota Padang Panjang dengan nilai 94.46 (kualitas tertinggi)

5. Pemerintah Kota Padang dengan nilai 93.67 (kualitas tertinggi)

6. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 93.51 (kualitas tertinggi)

7. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 92.70 (kualitas tertinggi)

8. Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan nilai 91.23 (kualitas tertinggi)

9. Pemerintah Kaupaten Dharmasraya dengan nilai 91.14 (kualitas tertinggi)

10. Pemerintah Kota Pariaman dengan nilai 90.98 (kualitas tertinggi)

11. Pemerintah Kota Solok dengan nilai 90.49 (kualitas tertinggi)

12. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai 89.86 (kualitas tertinggi)

13. Pemerintah Kota Bukittinggi dengan nilai 89.55 (kualitas tertinggi)

14. Pemerintah Kota Sawahlunto dengan nilai 89.46 (kualitas tertinggi)

15. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai 89.44 (kualitas tertinggi)

16. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan nilai 89.33 (kualitas tertinggi)

17. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai 88.85 (kualitas tertinggi)

18. Pemerintah Kab.upaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 88.42 (kualitas tertinggi)

19. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan nilai 87.06 (kualitas tinggi). (*/yki)